

INTERDEPENDENSI AKTOR DALAM PROSES PRODUKSI KOMODITAS CABAI DI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI

Kayla Putri Zahra, Retna Hanani

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id>
Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of actor interdependency in the production process of chili commodities in Kumpeh District, Muaro Jambi Regency, and to identify the driving and inhibiting factors within these dependency relationships. The challenges in chili production in this area are not solely related to technical cultivation aspects, but also reflect a gap between local government policies and farmers' needs in the field. The involvement of Bank Indonesia as a non-governmental actor in the development of the chili cluster has contributed to a shift in farmers' dependency patterns, indicating the dynamics of network governance within the regional agricultural sector. This research employs a descriptive qualitative method using in-depth interviews with key informants. The analysis focuses on identifying patterns of resource exchange, forms of dependency relationships, and the quality of coordination among actors. The findings reveal that interdependency among actors has emerged based on mutual awareness of their respective resource limitations and capacities. However, these relationships remain largely pragmatic and have not yet been institutionalized within a shared regulatory framework, resulting in asymmetric dependency patterns that do not fully reflect optimal network coordination. The driving factors of interdependency include actors' awareness of the need for collaboration, the responsiveness and flexibility of Bank Indonesia's programs, and the leadership initiatives of village governments. Meanwhile, the main inhibiting factors consist of ineffective bureaucratic communication, unclear cross-sectoral coordination mechanisms, limited capacity of agricultural extension officers, and ecological factors in the form of recurring annual floods that have not been integrated into program planning. This study concludes that the existing interdependency remains pragmatic and asymmetric in nature. It recommends the institutionalization of coordination mechanisms through joint standard operating procedures and the synchronization of the government's budgeting calendar with the actual planting cycles of farmers in the field.

Keywords: *Interdependency, Actor Relation, Production Process, Chili Commodity, Agricultural Policy*

PENDAHULUAN

Struktur perekonomian Provinsi Jambi hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian sebagaimana tercermin dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang utama perekonomian daerah, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu subsektor yang memiliki potensi strategis adalah hortikultura, khususnya komoditas cabai merah yang memiliki peluang pasar besar seiring dengan tingginya tingkat konsumsi dan fluktuasi harga yang cenderung signifikan. Data menunjukkan bahwa produksi cabai merah di Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 170,34 ton, yang mengindikasikan adanya kapasitas produksi yang cukup tinggi sekaligus peluang untuk terus dikembangkan.

Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu wilayah penghasil komoditas hortikultura turut mengambil peran penting dalam mendukung produksi cabai merah. Secara lebih spesifik,

Kecamatan Kumpeh menjadi sentra produksi cabai dengan pusat kegiatan budidaya yang tersebar di Desa Maju Jaya dan Desa Mekar Sari. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas cabai merah di wilayah ini selama periode 2016–2020 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Rata-rata luas panen tercatat sebesar 155,2 hektare, dengan produksi mencapai 1.303,96 ton dan produktivitas sebesar 8,41 ton per hektare. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas produksi, baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis dalam proses budidaya dan tata kelola produksi.

Dalam kondisi ideal, pengelolaan komoditas cabai memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi dan harga. Petani sebagai aktor utama diharapkan mampu menghasilkan produksi yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya dukungan berupa kebijakan, program, serta fasilitas yang dapat meningkatkan kapasitas petani, seperti penyediaan

pupuk bersubsidi, akses terhadap teknologi pertanian, serta jaminan pemasaran hasil produksi.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik yang terjadi. Hingga saat ini, belum terdapat program khusus yang secara komprehensif mengatur pengelolaan komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh. Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi yang diadministrasikan oleh pemerintah seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Keterbatasan dukungan dalam penyediaan teknologi pertanian juga menjadi kendala yang menyebabkan petani belum mampu mengoptimalkan hasil produksi. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap sumber permodalan mendorong petani untuk mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, meskipun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani belum signifikan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses produksi cabai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis budidaya, tetapi juga oleh interaksi dan hubungan antaraktor yang

terlibat, seperti petani, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, lembaga keuangan, dan pelaku pasar. Hubungan antaraktor ini mencerminkan adanya interdependensi, di mana masing-masing pihak memiliki sumber daya, kepentingan, serta peran yang saling terkait dalam mendukung keberhasilan produksi. Oleh karena itu, pendekatan *network governance* khususnya dimensi *actors, interdependency, and frames* menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis bagaimana interdependensi antaraktor terbentuk dan bagaimana hubungan tersebut memengaruhi tata kelola produksi komoditas cabai.

KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma *Governance* dalam Administrasi Publik

Istilah *governance* digunakan untuk menggambarkan proses proses politik yang lebih inklusif, di mana kelompok masyarakat turut terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik. Pada intinya, *governance* melibatkan pola kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup partisipasi penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik, serta sektor swasta.

Selanjutnya, Osborne menjelaskan bahwa paradigma *New Public Governance* mencakup lima bentuk tata kelola yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Socio-political governance*
2. *Public policy governance*
3. *Administrative governance*
4. *Contract governance*
5. *Network governance*

B. Konsep *Network governance*

Konsep *network governance* pertama kali diperkenalkan oleh Keith G. Provan dan Patrick Kenis, yang menyoroti pentingnya interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan melalui jaringan kerja sama yang melibatkan institusi dan struktur berwenang dalam pengalokasian sumber daya. Perkembangan teori *network governance* kemudian disempurnakan oleh Klijn dan Koppenjan (2016), yang memandang jaringan kebijakan sebagai wadah interaksi strategis antaraktor dalam menghasilkan suatu solusi, kebijakan, maupun layanan publik. Lebih lanjut, *network governance* dianalisis

melalui empat dimensi utama berikut ini.

1. *Actors, Interdependency, and*

Frames: Dimensi ini menekankan bahwa jaringan terdiri dari aktor-aktor yang beragam dengan tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda. Meskipun setiap aktor menjalankan perannya masing-masing, mereka tetap saling bergantung melalui pertukaran sumber daya guna mencapai tujuan bersama.

2. *Network Management*: Dimensi

ini merupakan suatu bentuk upaya mengelola interaksi dan pertukaran sumber daya dalam jaringan agar kolaborasi dapat berjalan efektif, termasuk melalui fasilitasi dialog, negosiasi, dan koordinasi antaraktor.

3. *Institutional Features*: Dimensi

ini merujuk pada aturan, norma, dan regulasi yang mengatur perilaku aktor serta batasan dalam pertukaran sumber daya di dalam jaringan.

4. *Interactions and complexity*: Dimensi ini menegaskan bahwa

hubungan saling ketergantungan antaraktor akan melahirkan interaksi yang kompleks dan pola negosiasi dalam penyelesaian masalah.

C. Faktor Pengaruh *Network governance*

Berdasarkan pemikiran pratikno, dkk. (2007) mengenai interdependensi, pertukaran sumber daya, dan struktur jaringan, dapat ditarik pemahaman bahwa keberlangsungan suatu network dipengaruhi oleh beberapa kondisi pendukung, antara lain:

1. **Komunikasi yang Efektif:** Komunikasi di sini merujuk pada kemampuan antaraktor untuk saling memahami pesan masing-masing, sehingga interaksi yang terjadi dapat menghasilkan respons yang selaras dengan tujuan bersama.
2. **Kejelasan Kelembagaan:** Kelembagaan dalam jaringan dimaknai sebagai pengaturan mengenai pembagian peran, kewenangan masing-masing aktor yang terlibat, termasuk mekanisme respons yang dapat dilakukan ketika terjadi

ketimpangan kekuasaan maupun distribusi sumber daya antaraktor.

3. **Kesadaran Aktor atas Ketergantungan Satu Sama Lain:**

Kesadaran aktor yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas adanya permasalahan bersama yang mendesak untuk diselesaikan, tetapi juga kesadaran akan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dari kesadaran inilah muncul kemauan untuk berbagi sumber daya. Proses berbagi sumber daya tersebut kemudian melahirkan hubungan saling ketergantungan (*interdependency*) antaraktor, yang menjadi ciri utama dari terbentuknya *network governance*.

4. **Komitmen Aktor Kunci:**

Keberlangsungan tata kelola jaringan juga sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dari aktor pemimpin atau aktor kunci dalam jaringan. Komitmen ini berperan dalam menjaga kesinambungan kerja

sama, terutama ketika jaringan menghadapi hambatan atau konflik kepentingan. Komitmen tersebut dapat muncul karena dua hal, yaitu keterikatan terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan jaringan atau dorongan kesadaran internal pemimpin terhadap pentingnya keberlanjutan kerja sama antaraktor.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam menentukan subjek penelitian, digunakan teknik *purposive* dan kemudian dilakukan wawancara terhadap 7 informan yang meliputi: Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh, Kepala Desa Mekar Sari, Kepala Desa Maju Jaya, Perwakilan Petani Desa Mekar Sari, Perwakilan Petani Desa Maju Jaya, serta aktor dari non-pemerintah yang juga terlibat dalam proses produksi komoditas cabai di

Kecamatan Kumpeh, yaitu Koordinator Program Klaster Cabai Wilayah Kecamatan Kumpeh dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan. Data kuantitatif digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan latar belakang, meliputi informasi numerik yang dihimpun dari data sekunder berdasarkan beragam sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang memuat kajian tentang proses produksi komoditas hortikultura khususnya tanaman cabai. Selanjutnya, data kualitatif digunakan untuk menyajikan pembahasan hasil penelitian dari sumber primer, melalui wawancara dan observasi.

Selanjutnya, analisis data atau informasi yang dilakukan pada penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Terakhir, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, aktor yang terlibat dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh meliputi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi sebagai aktor kunci yang berperan dalam perumusan kebijakan pengembangan komoditas cabai; Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh sebagai aktor yang melakukan pendampingan teknis secara langsung kepada petani di lapangan; Pemerintah Desa Mekar Sari dan Desa Maju Jaya sebagai aktor lokal yang memfasilitasi hubungan antara petani dengan aktor eksternal; petani di kedua desa tersebut sebagai pelaku utama produksi; serta Bank Indonesia Perwakilan Jambi sebagai aktor non-pemerintah yang turut mendukung proses produksi, khususnya dalam aspek pembiayaan dan program pemberdayaan. Masing-masing aktor memiliki sumber daya, peran, dan kewenangan yang berbeda, sehingga membentuk jaringan produksi cabai yang bersifat majemuk dan saling bergantung.

Selanjutnya, hubungan saling ketergantungan tersebut dianalisis melalui kualitas interdependensi yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas interdependensi

antaraktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh masih belum seimbang. Secara formal, pemerintah daerah memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan sektor pertanian. Namun, dalam praktiknya, ketergantungan petani justru lebih besar kepada Bank Indonesia yang dinilai lebih responsif dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan produksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa interdependensi yang terbentuk belum berjalan secara optimal dalam kerangka *network governance*, karena belum terintegrasinya peran antaraktor dalam suatu sistem koordinasi yang utuh.

Lebih lanjut, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur pengembangan komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh, khususnya dalam mengoordinasikan hubungan antaraktor agar mekanisme kerja dan pembagian peran menjadi lebih jelas. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang mengatur pembagian kewenangan dan fungsi masing-masing aktor—mulai dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai perumus kebijakan, Balai Penyuluh Pertanian sebagai pendamping teknis, hingga kelompok tani sebagai

pelaksana di tingkat lapangan—namun regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjembatani perbedaan cara pandang antaraktor yang dipengaruhi oleh kepentingan institusional dan posisi masing-masing dalam jaringan produksi.

Selain itu, permasalahan juga terletak pada ketidaksinkronan kerangka pikir antaraktor dalam memahami dan merespons permasalahan di lapangan. Meskipun seluruh aktor mengidentifikasi banjir dan keterbatasan distribusi pupuk sebagai permasalahan utama, terdapat perbedaan dalam cara memaknai dan menanganinya. Pemerintah cenderung memandang banjir sebagai fenomena musiman yang dapat diantisipasi melalui pengaturan kalender tanam, sementara petani melihat permasalahan tersebut sebagai risiko yang belum tertangani secara konkret, bahkan seringkali dihadapkan pada tekanan untuk melakukan panen sebelum banjir terjadi serta ancaman hama dan penyakit tanaman. Di sisi lain, keterbatasan jumlah pupuk bersubsidi menyebabkan distribusinya tidak optimal, sehingga kelompok tani mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian yang adil kepada anggotanya. Perbedaan cara pandang dan respons ini pada akhirnya

memengaruhi kualitas interdependensi antaraktor, sehingga hubungan yang terbentuk belum mampu mendukung tata kelola produksi cabai secara efektif.

interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi terbentuk sebagai konsekuensi dari perbedaan peran, kewenangan, serta kepemilikan sumber daya di antara para aktor yang terlibat.

Interdependensi antaraktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam membentuk sekaligus menentukan kualitas hubungan dalam jaringan tersebut. Dari sisi pendukung, kesadaran masing-masing aktor akan pentingnya saling ketergantungan menjadi fondasi utama yang memungkinkan terjadinya kerja sama, di mana setiap aktor memahami bahwa keberhasilan produksi tidak dapat dicapai secara individual. Kesadaran ini kemudian diperkuat oleh peran pemerintah desa yang memiliki kedekatan sosial dengan petani, sehingga mampu menjembatani komunikasi dan kebutuhan antara aktor lokal dan eksternal. Selain itu, keberadaan aktor eksternal yang responsif dan fleksibel

dalam menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan lapangan juga turut memperkuat dinamika interdependensi yang terbentuk.

Namun demikian, kualitas interdependensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kontekstual. Komunikasi antaraktor yang belum berjalan secara efektif menyebabkan informasi terkait program, bantuan, maupun kebutuhan riil petani tidak tersampaikan secara utuh. Di sisi lain, belum adanya kejelasan kelembagaan yang mengatur mekanisme koordinasi antaraktor mengakibatkan pembagian peran menjadi tidak tegas, sehingga memunculkan kecenderungan aktor untuk berjalan sendiri-sendiri atau bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan. Lemahnya komitmen aktor kunci dalam menjaga kesinambungan koordinasi juga turut memengaruhi stabilitas hubungan yang terbentuk. Selain itu, keterbatasan kapasitas penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis serta faktor ekologis berupa banjir tahunan menjadi kendala tambahan yang tidak hanya berdampak pada aspek produksi, tetapi juga memperlemah kualitas hubungan

ketergantungan antaraktor. Dengan demikian, kombinasi antara faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa interdependensi yang terbentuk masih bersifat dinamis, namun belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola produksi cabai secara optimal.

KESIMPULAN

Interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi terbentuk karena adanya perbedaan peran, kewenangan, dan kepemilikan sumber daya antaraktor yang terlibat. Namun, kualitas hubungan ketergantungan tersebut belum berjalan secara seimbang dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari perbedaan tingkat responsivitas antaraktor, di mana hubungan petani dengan Bank Indonesia cenderung lebih adaptif dibandingkan dengan relasi petani dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang masih bersifat administratif. Selain itu, kesamaan tujuan antaraktor belum sepenuhnya diikuti oleh kesamaan kerangka pikir, sehingga interdependensi yang terbentuk masih berjalan secara parsial. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa interdependensi

aktor didukung oleh adanya kesadaran akan saling ketergantungan, kepemimpinan pemerintah desa yang proaktif, serta responsivitas aktor eksternal dalam mendukung kebutuhan produksi. Namun demikian, hubungan tersebut juga menghadapi berbagai hambatan, seperti komunikasi yang belum efektif, ketidakjelasan kelembagaan, lemahnya komitmen aktor kunci, keterbatasan kapasitas penyuluh, serta faktor ekologis berupa banjir tahunan. Kondisi tersebut menyebabkan interdependensi antaraktor dalam produksi cabai di Kecamatan Kumpeh belum berkembang secara optimal menjadi jaringan kerja yang terkoordinasi dan responsif.

SARAN

1. Relasi antaraktor masih bertumpu pada regulasi sektoral yang parsial, sehingga diperlukan mekanisme formal seperti SOP, MoU, atau regulasi kolaboratif yang mengatur pembagian peran dan koordinasi secara jelas, sekaligus menyelaraskan perbedaan cara pandang. Dalam hal ini, DTPH perlu berperan sebagai inisiator kolaborasi.
2. Komunikasi antaraktor perlu diperkuat melalui forum koordinasi yang terstruktur dan rutin, agar tidak hanya bersifat situasional, sehingga dapat menyamakan persepsi dalam menangani persoalan produksi seperti pupuk dan banjir serta meminimalkan miskomunikasi.
3. Kapasitas penyuluh perlu diperkuat baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis, khususnya pada komoditas cabai, serta didorong untuk berperan lebih dalam perumusan kebijakan agar informasi lapangan dapat terakomodasi.
4. Mengingat banjir merupakan persoalan tahunan, diperlukan kajian teknis yang komprehensif dan komitmen bersama untuk menyusun strategi adaptasi jangka panjang, disertai komunikasi yang realistis kepada petani agar tidak menimbulkan ekspektasi yang tidak terpenuhi.
5. Perlu standardisasi peran pemerintah desa dalam sektor pertanian melalui Perdes atau integrasi dalam dokumen perencanaan desa, agar dukungan terhadap komoditas cabai bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung pada inisiatif personal.

6. Petani perlu didorong memperkuat kelembagaan kelompok tani sebagai ruang belajar dan koordinasi kolektif, melalui peningkatan kapasitas manajerial dan perencanaan usaha tani, guna memperkuat posisi tawar serta mengurangi ketergantungan pasif dan potensi distorsi distribusi bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Dimas, Marthen Patiung, Yoakim Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode, and Surya Yudha Regif. “*Network governance* Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 63–70.
- Azzahra, Nafa. “Hubungan Perilaku Petani Dengan Produktifitas Usahatani Cabai Merah Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.” *Skripsi Universitas Jambi*, 2025, 6. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74738>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. “Produksi Sayuran Dan Buah-Buahan Provinsi Jambi 2024,” 2025.
- Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh. “Laporan Pertanian Kumpeh 2020.” Kabupaten Muaro Jambi, 2020.
- BPS Kabupaten Muaro Jambi. “Kecamatan Kumpeh Dalam Angka 2024.” Vol. 25. Kabupaten Muaro Jambi, 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan II-2024,” 2024.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. “Pemerintah Dan Bank Indonesia Memperkuat Sinergi Guna Menjaga Inflasi 2025.” *bi.go.id*, 2025. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/>
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi. (2021). Rencana Strategis Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021-2026.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Budidaya Cabai Yang Baik Dan Benar (Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, Dan Pemanenan Tanaman Cabai)*. 1st ed. FAO Indonesia, 2013. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/be829id>.
- Hidayat, Kliwon, Yayuk Yuliati, and Witono. “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kapas Bojonegoro” 26, no. 2 (2024): 1222–32.
- Hijri, Yana Syafieyana, Muhammad Kamil, Bayu Sadewo, and Iradhad Taqwa Sihidi. “Network Govenance Dalam Pemenuhan Ketrediaan Pangan Di Kota Malang.” *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram* 7, no. 2 (2021): 207–29.
- Jambi24jam.com. “Data BPBD Kabupaten Muaro Jambi Hingga Saat Ini Sebanyak 2.079 Rumah Terendam Banjir,” 2024. https://www.jambi24jam.com/2024/01/data-bpbd-kabupaten-muaro-jambi-hingga.html#google_vignette.
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

- Kusmea Dinata, S.P, M.P Yulie Oktavia, S.P, M. Herlena Bidi Astuti, S.P, S.P Yesmawati, S.P Sudarmansyah, M.Agr.Sc Irma Calista, S.T, M.P Dr. Monita Puspitasari, S.P, et al. *Budidaya, Produksi Benih Dan Pascapanen Cabai*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021.
- Latifa, Dara, Faidil Tanjung, and Dwi Yuzaria. "Analisis Daya Saing Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Cabai Merah Keriting Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia." *Agro Bali : Agricultural Journal* 4, no. 3 (2021): 447–58. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i3.741>.
- Nagel, Melanie, and Carlos Bravo Laguna. "Analyzing Multi Level Governance Dynamics from a Discourse Network Perspective : The Debate over Air Pollution Regulation in Germany." *Environmental Sciences Europe* 34, no. 62 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12302-022-00640-0>.
- Pemerintah Desa Maju Jaya. "Website Resmi Desa Maju Jaya." Accessed November 19, 2025. <https://www.majujaya.desa.id/>.
- Pemerintah Desa Mekar Sari. "Website Resmi Desa Mekar Sari." Accessed November 19, 2025. <https://mekarsari-kumpeh.desa.id/data-wilayah>.
- pemkab.muarojambikab.go.id. "Wilayah Administrasi," 2019. <https://pemkab.muarojambikab.go.id/wilayah-administrasi>.
- Rossilawati, Risky Shinta, Retna Hanani, and Kismartini. "*Network governance* Dalam Peningkatan IPM Perempuan Di Kabupaten Wonogiri." Universitas Diponegoro, 2024.
- Syukron, Mauwlana. "Analisis Value Chain Komoditas Cabai (Studi Kasus Kecamatan Kumpeh Di Kabupaten Muaro Jambi)." Universitas Jambi, 2023.
- Wijaya, Benny. "Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Gelar Program Pembelian Cabai Untuk Bantu Petani." rri.co.id, 2024. <https://rri.co.id/daerah/1071407/pemerintah-kabupaten-muaro-jambi-gelar-program-pembelian-cabai-untuk-bantu-petani>.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Keloembagaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkup Kementerian Pertanian.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013–2033.
- Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Presiden Republik Indonesia. (2024).

Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2024 tentang Kementerian

Pertanian.